



Memaknai
Tumbuk Ageng
GKR HEMAS



Editor:
Dr. Faraz, MM

Memaknai Tumbuk Ageng GKR Hemas

Tim Penyusun : Faraz (Koordinator)

Anggota : 1. Indra Syamsi
2. Fadmi Sustiwi
3. Sigit Sugito
4. Syahbenol Hasibuan



PENERBIT PT KANISIUS

Memaknai *Tumbuk Ageng* GKR Hemas

1016003093

© 2016-PT Kanisius

PENERBIT PT KANISIUS (Anggota IKAPI)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA

Telepon (0274) 588783, 565996; Faks (0274) 563349

E-mail : office@kanisiusmedia.com

Website : www.kanisiusmedia.com

Cetakan ke- 3 2 1

Tahun 18 17 16

Editor : Dr. Faraz, MM, Lucia Indarwati

Desainer Sampul : Joko Sutrisno

Desainer Isi : Yustinus Saras

Foto cover : Ign. Dwi Karyanto

ISBN 978-979-21-5091-9

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari Penerbit

Dicetak oleh PT Kanisius Yogyakarta

Kata Pengantar Sri Sultan Hamengku Buwono X

“Tantangan Kesetiaan-Kreatif Seorang Isteri”

TUMBUK AGENG atau delapan windu merupakan momentum penting dalam siklus hidup Manusia Jawa, karena memberi penanda masuk ke masa senja. Orang Jawa menyebutnya: *wayah ing surup*. Menjelang senja, asar hampir usai, magrib akan tiba. Inilah saatnya orangtua membimbing anak-cucu memasuki pergantian masa, dari keremangan senja ke malam tiba, menuju titik-titik terangnya pelita di kejauhan sana.

Meski gambaran metaforisnya bagai semudah membalik telapak tangan, tetapi sesungguhnya di alam nyata akan melewati masa transisi yang tidaklah mudah. Sebab, tidak cuma siklus hidup, siklus alam dan siklus sejarah pun juga terjadi. Jika menengok ke belakang, putaran zaman sedang berproses

tetapi permohonan tulisan dari sekian narasumber, pakar, tokoh masyarakat yang super sibuk tentu sangat tidak mudah. Selain itu, menulis tentang Bu Ratu merupakan tantangan tersendiri bagi beberapa orang, bahkan ada calon penulis setelah beberapa hari mencoba menulis mengatakan “minta maaf” tidak bisa melanjutkan. Tidak diketahui persis masalahnya, yang pasti kami sangat menghargai nilai dan kepercayaan yang masih eksis di masyarakat sehingga tidak mudah bagi mereka ketika diminta berkomentar tentang Ratunya yang sangat dicintai.

Atas nama Tim Penyusun buku, kami mengucapkan terima kasih untuk semua kontributor buku ini, khususnya Sri Sultan Hamengku Buwono X yang telah memberikan kata pengantar. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Penerbit Buku Kanisius atas kerjasamanya. Semoga masukan dan kritik bapak dan ibu menjadi satu bukti balasan cinta dan perhatian ataupun kado untuk beliau, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang genap berusia Delapan Windu. Semoga.

Dr. Faraz, MM

Daftar Isi

Kata Pengantar	
Sri Sultan Hamengku Buwono X	v
Pengantar Editor	xv
<i>Bugenvil dalam Bejana Pualam</i>	1
Wanodya: linuwih, adiluhung	3
Kiai Haji Jazir, Asp.	
Sang Wanodyâtâmâ Pengemban Misi Sejarah	9
Hari Dendi	
GKR Hemas atau Bu Ratu	
Gelar dan Sebutan yang Menyimpan Hormat	
Sekaligus Kedekatan	19
G. Budi Subanar	
Pembela Hak-hak Perempuan dari Yogya	35
Djasarmen Purba	
Pejuang Kesetaraan dari Keraton Ngayogyakarta	45
Fadmi Sustiwi	

Pembuka Hak Asasi Perempuan dalam Kehidupan Keraton Yogyakarta	55
Masruchah	
Antara Menjaga Tradisi – Menjadi Pembaharu	65
Dr. Y Sari Murti W., SH, Mhum.	
Perjuangan Belum Usai	73
Dr. Budi Wahyuni	
GKR Hemas Dalam Tiga Ruang	83
Ons Untoro	
<i>Sosok Pemimpin Penuh Perhatian</i>	95
Permaisuri GKR Hemas, Keteguhan Sebuah Tekat	97
GKBRAA Paku Alam	
Memimpin dengan Konsep Ibu	105
Immawan Wahyudi	
Tujuh Tahun Bersama Bu Ratu	113
M. Afnan Hadikusuma	
Ibu Ratu Yang Saya Kenal	127
Drs. H.A. Hafidh Asrom, MM	
Sosok Pemimpin Yang Melayani	133
Nahiyah Jaidi Faraz	
Ibu Ratu Kita	141
Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd.	
Ini Ceritaku untuk Ibu Ratu	147
Martanti Endah Lestari	
Permaisuri nan Perkasa	155
Syahbenol Hasibuan	

<i>Ratu dengan Satu Juta Suara</i>	163
Ratu dengan Sejuta Suara	165
Bayu Dardias	
Kiprah Sosial Politik	
Sang Permaisuri Raja Yogyakarta	179
Zuly Qodir	
Tetaplah Menjadi Payung Warga Yogyakarta	195
Dr. Sumbo Tinarbuko	
Kiprah Politik GKR Hemas:	
Dari Lokal Hingga Nasional	205
Prof. Dr. Partini	
Membalas Cinta Rakyat	
Potret Cinta Rakyat Pada Ratunya	219
Mustofa W Hasyim	
Mendewasakan Politik Indonesia	
Dimulai dari Keraton Yogyakarta	231
Farsijana Adeney-Risakotta PhD	



Ratu dengan Sejuta Suara

Bayu Dardias

Mayoritas ilmuwan politik berpendapat bahwa politik aliran yang populer tahun 1950-an kurang bisa menjelaskan fenomena politik pasca reformasi. Aliran politik ditandai dengan spektrum antara Islam, Nasionalis, Komuni, dan Sosialis (di dalam keempatnya ada elemen modernitas Barat, tradisionalisme Jawa, dan tradisionalisme Islam). Sejak Orde Baru, politik aliran kurang mendapatkan tempat, terutama setelah fusi partai tahun 1971 yang memangkas partai menjadi tiga. Setelah reformasi, partai-partai sulit dipilah-pilah berdasarkan ideologi politiknya, walaupun beberapa memiliki jalur pemilih yang didasarkan atas akar historis

dan kultural yang kuat. Golkar misalnya, telah memecah diri dalam bentuk ideologi yang sama dengan Nasdem, Gerindra, dan Hanura yang juga sulit dicari perbedaan ideologisnya dengan Demokrat. Walaupun mendasarkan diri pada pemilih Islam yang berbeda latar belakang, tak mudah mencari pembeda ideologis antara PAN, PKS, PPP, dan PKB. PDIP mungkin masih menyimpan ideologi PNI, tetapi sudah bermetamorfosis sehingga pilihan-pilihan kebijakannya lebih mengandalkan kalkulasi politik dibandingkan ketaatan ideologis. Di politik daerah, jejak ideologis, misalnya berkaitan dengan pencalonan pasangan calon di pilkada, nyaris tidak terlihat.



GKR Hemas saat kampanye di Kulonprogo 2014/Dok. Pribadi

Namun, jika melihat politik elektoral di tingkat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), peta ideologi tampak terwakili dengan jelas. Saya berpendapat bahwa dalam tiga kali pemilihan DPD di DIY

menegaskan alur pilihan ideologis antara Tradisionalisme Jawa, Islam Tradisional, Islam Modernis, dan Islam Tarbiyah. Tahun 2004 merupakan tahun penjajakan ideologis dan dua pemilu DPD terakhir yaitu di tahun 2009 dan 2014, keempat wakil DPD dari DIY mewakili keempat aliran ideologis tersebut yaitu Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas (Tradisionalisme Jawa), Islam Tradisional/NU (Hafidh Asrom), Islam Modernis/Muhammadiyah (M Afnan Hadikusumo), dan Islam Tarbiyah/PKS (Cholid Mahmud). Mengamati hasil dari tiga Pemilu DPD tersebut, GKR Hemas mendominasi perolehan suara. Gabungan suara ketiga senator terpilih kurang dari separuh perolehan suara GKR Hemas. Artinya, ideologi Tradisionalisme Jawa yang tidak pernah dominan di tahun 1950-an mampu mendominasi politik DPD di DIY pasca reformasi.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan secara singkat kemenangan GKR Hemas di tiga pemilu DPD dalam konteks aliran politik di Yogyakarta. Selain fenomena munculnya politik aliran, saya berpendapat bahwa kemenangan GKR Hemas tidak semata-mata disebabkan karena statusnya sebagai permaisuri Sultan Hamengkubuwono X, tetapi karena perannya di ranah sosial kemasyarakatan dan kemampuannya menciptakan mesin kampanye yang solid dan efektif.

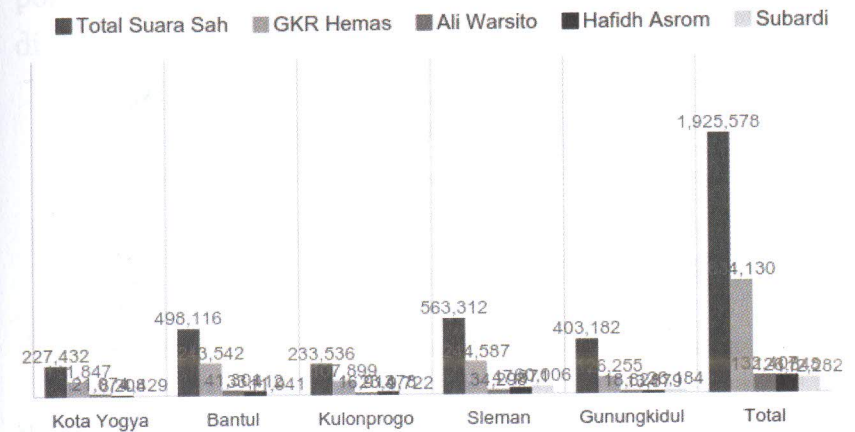
Tulisan ini akan dimulai dengan memaparkan hasil pemilu DPD DIY tahun 2004, 2009, dan 2019. Bagian selanjutnya akan membahas dua sumber kekuatan politik GKR Hemas yaitu jaringan sosial kemasyarakatan dan tim sukses. Terakhir, tulisan ini akan diakhiri dengan pertanyaan terkait penerus peran politik sang Ratu.

Capaian GKR Hemas dalam Tiga Pemilu DPD

Sebaran penduduk dan geografis Indonesia yang tidak merata menyebabkan perlunya perwakilan yang tidak berbasis penduduk, tetapi berbasis geografis, yang diwujudkan dalam DPD. Perwakilan DPD ditentukan dari perwakilan provinsi, berapapun jumlah penduduknya. Masing-masing provinsi mewakilkan empat orang untuk duduk di DPD. Berbeda dengan DPR yang pencalonannya ditentukan oleh partai politik, pencalonan DPD dilakukan oleh masing-masing individu, walau dalam banyak kasus, jaringan partai dan ormas berada di belakang kandidat calon DPD.

Sejak pemilu DPD pertama kali dilakukan pada tahun 2004 bersamaan dengan pemilu untuk DPR/D di berbagai tingkatan, nuansa persaingan telah kuat. Perdebatan muncul berkaitan dengan hubungan antara partai politik dengan perwakilan DPD. Misalnya, apakah calon harus terpisah dari partai politik dan merupakan representasi dari golongan yang tidak terwakili di partai (seperti konsep Utusan Golongan semasa Orde Baru), ataukah pilihan diberikan ke masyarakat yang memberikan suaranya di bilik suara terlepas dari latar belakang, afiliasi calon dan mesin politiknya. Di Yogyakarta, persaingan muncul antara berbagai aliran politik yang pada akhirnya memunculkan pemenang GKR Hemas (Tradisionalisme Jawa), Ali Warsito (Muhammadiyah), Hafidh Asrom (NU), dan Subardi (Golkar). Subardi yang merupakan representasi Golkar dan komunitas sepakbola, tidak lagi menang di dua pemilu DPD berikutnya. Keempat wakil DPD DIY ini melengkapi total 132 anggota DPD (dari 32 Provinsi) dari seluruh Indonesia.

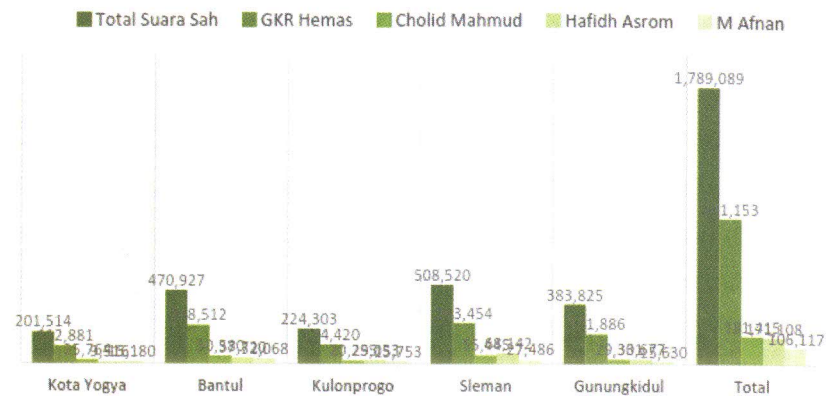
Tabel 1
Hasil Pemilu DPD DIY 2004



Sumber: KPU DIY

Tabel 1 hasil Pemilu DPD DIY menunjukkan GKR Hemas sangat dominan. GKR Hemas mampu mendapatkan suara 834.407 suara atau 43% total suara sah (1,9 juta suara). Apabila angka capaian GKR Hemas sejumlah 834.407 digunakan sebagai bilangan pembagi, ketiga senator DIY lainnya hanya mendapatkan 44% dari total suara GKR Hemas, tak sampai separuh. Suara GKR Hemas juga merata di lima kabupaten/kota di DIY. Selain di empat daerah lainnya capaian suara GKR Hemas di atas 40%, capaian suara di Gunung Kidul paling rendah dan “hanya” mencapai 31%. Sukses pemilu 2004 diulang di pemilu 2009 seperti Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Hasil Pemilu DPD DIY 2009

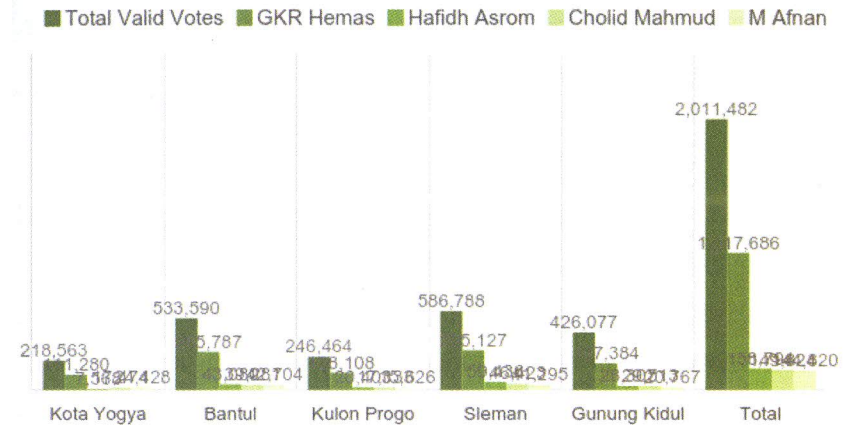


Sumber: KPU DIY

Hasil Pemilu DPD DIY 2009 kembali mengulang dominasi GKR Hemas dan meneguhkan aliran politik di Yogyakarta. Subardi digantikan aliran Islam Tarbiyah dengan PKS sebagai mesih politiknya. GKR Hemas (Tradisionalisme Jawa) mendominasi perolehan di seluruh kabupaten/kota di DIY dibandingkan dengan tiga senator lainnya: Cholid Mahmud (PKS/Tarbiyah), Hafidh Asrom (NU), dan M Afnan Hadikusumo (Muhammadiyah). Total perolehan suara GKR Hemas adalah 52% dari total suara sah, jauh meninggalkan Cholid Mahmud (10%), Hafidh Asrom (9,5%), dan M Afnan (6%). Tahun 2009 juga terjadi peningkatan di semua kabupaten kota termasuk di Gunung Kidul dengan capaian di atas separuh total suara sah. Di Gunung Kidul tahun 2004 capaian suara GKR Hemas adalah 31% dari total suara sah, tahun 2009 perolehannya meningkat 19% menjadi 50%. Hasil Pemilu 2009 memberikan pijakan kuat bagi Sang Ratu

untuk duduk di kursi wakil ketua DPD, menembus dominasi politik laki-laki di tingkat nasional. Dominasi yang sama diulang kembali di pemilu 2014.

Tabel 3
Hasil Pemilu DPD DIY 2014



Sumber: KPU DIY

Pada pemilu 2014, untuk pertama kalinya suara GKR Hemas dapat menembus satu juta suara dan keempat senator terpilih kembali. Prosentase jumlah total suara GKR Hemas dibandingkan total suara sah menurun dibandingkan dengan pemilu 2009 tetapi tetap sekitar tujuh kali lipat dibandingkan dengan masing-masing tiga senator lainnya. Suara GKR Hemas juga merata di seluruh kabupaten/kota dibandingkan dengan 12 kandidat DPD lainnya. Beberapa kandidat DPD *high profile* yang turut bertarung di DIY, misalnya mantan ketua MPR Sidarto Danusubroto yang didukung PDIP tak mampu menembus kuatnya mesin aliran politik DIY. Perolehan suara satu juta mengantarkan GKR

Hemas kembali menjadi wakil ketua DPD untuk kedua kalinya. Di antara pimpinan DPR, DPD dan MPR, GKR Hemas adalah satu-satunya perempuan yang menduduki posisi pimpinan lembaga. Pertanyaannya, bagaimana GKR Hemas memperoleh suara sedemikian dominan? Apakah faktor aristokrasi sebagai permaisuri Sultan Hamengkubuwono X memberikan dampak yang signifikan?

Sumber Suara Sang Ratu

Tidak bisa dinafikan, gelar perempuan tertinggi di struktur bangsawan Jawa memberikan dampak signifikan. Gusti Ratu tidak perlu memperkenalkan diri karena dirinya sudah dikenal masyarakat sejak Sultan Hamengkubuwono X ditetapkan menggantikan ayahnya sebagai Sultan Yogyakarta tahun 1989. Artinya, Gusti Ratu telah memulai “kampanye” ke berbagai elemen masyarakat Yogyakarta melalui acara tradisional. Selain itu, setelah Sultan Hamengkubuwono X dilantik menjadi Gubernur pada tahun 1998, peran Gusti Ratu menjadi bertambah banyak, termasuk mendampingi Sultan di acara-acara formal. Inilah modal sosial yang dirintisnya sejak lama.



GKR Hemas saat bertanya tentang pemasaran keripik belut/Dok. Pribadi

Penggunaan gelar bangsawan untuk menarik suara tidak hanya identik dengan GKR Hemas tetapi digunakan oleh banyak bangsawan lainnya di seluruh Indonesia, baik di DPD maupun di DPR/D. Di Jawa Tengah, putri Susuhunan Pakubuwono XII GKRAy Koes Indriyah sukses menjadi anggota DPD 2009-2014 dan kembali menjadi anggota DPD antar waktu pada April 2016. Di Ternate, Sultan Mudaffar Sjah menjadi anggota DPR 2004-2009 sementara istrinya Boki Nita Budhi Susanti menjadi anggota DPD. Pada pemilu 2009, keduanya berganti posisi. Pada pemilu 2014, hanya Sultan Mudaffar yang terpilih sementara istrinya gagal mempertahankan kursi DPR dari Partai Demokrat. Hanya saja, dari data penulis terkait kiprah aristokrasi dalam politik pasca reformasi, sedikit bangsawan yang secara konsisten

mampu memenangkan berbagai kompetisi elektoral secara berkelanjutan selama 15 tahun seperti yang dicapai oleh Gusti Ratu. Pendeknya, faktor kebangsawanan saja tidak cukup menjelaskan keberhasilan elektoral Ratu Hemas. Dua faktor yang cukup dominan atas kesuksesan politik Sang Ratu adalah kiprahnya di organisasi sosial dan tim sukses yang solid.

Gusti Kanjeng Ratu Hemas cukup lama dan aktif berkecimpung di berbagai organisasi kemasyarakatan di DIY. Dalam website pribadi beliau, Ratu Hemas memimpin, mengarahkan dan membina 23 organisasi kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan dan dukungan terhadap minoritas, perempuan, anak dan keluarga yang selama ini terabaikan. Salah satu organisasi yang diketuai GKR Hemas adalah Yayasan Kanker Indonesia (YKI). Kantor YKI berada di Sendowo, dekat dengan RSUD dr. Sardjito yang merupakan rumah sakit rujukan di DIY dan juga di Jawa Tengah bagian Selatan. Persoalannya, penderita kanker tidak bisa sekali berobat. Pasien yang harus melakukan *chemotherapy* misalnya, harus menginap dua tiga hari di jadwal kemo yang memakan waktu sehari. Untuk pasien yang berasal dari Kebumen atau Cilacap, pengeluaran untuk menginap juga harus diperhitungkan, karena biasanya ditemani anggota keluarga. Berdasarkan hal itu, memanfaatkan tanah Sultan Ground, GKR Hemas dan pengurus YKI membangun kantor dua lantai. Lantai bawah bisa digunakan oleh pasien kanker dan keluarganya sebagai rumah singgah. Harga per harinya, tidak lebih mahal dari se-

mangkok bakso per hari, sekadar untuk ongkos perawatan. Ada sekitar 10 tempat tidur yang bisa digunakan, terutama yang berasal dari golongan kurang mampu.

Posisi sebagai permasuri dan jabatan yang disandang beliau (yang seringkali ditawarkan bukan diraih) memungkinkan GKR Hemas untuk menjalin komunikasi dengan pemilih tersegmentasi terutama dari kalangan perempuan. Karena basis pendukungnya berada di Yogyakarta, rutinitias GKR Hemas tiap minggu hampir selalu sama, terbang ke Yogyakarta pada akhir minggu dan kembali ke Jakarta di awal minggu. Pemilih yang sebagian besar adalah perempuan merupakan konsentrasi yang sengaja dipilih Ibu Ratu. Segmentasi ini diperkuat dengan tim sukses yang solid.

Tim sukses GKR Hemas setidaknya terdiri dari tiga elemen, satu di Jakarta dan dua di Yogyakarta. Di Jakarta, tim ini bekerja berdasarkan administrasi dan efisiensi. Tidak ada keistimewaan bagi orang Jawa. Asisten beliau, yang sudah membantu lebih dari sepuluh tahun misalnya, bahkan tak cakap berbahasa Jawa. Tim ini lebih berperan membantu tugas sehari-hari sebagai anggota dan wakil ketua DPD.

Di Yogyakarta, tim GKR Hemas terdiri dari jaringan-jaringan sosial yang dengan mudah dirubah menjadi tim sukses untuk pemilu setiap lima tahun sekali. Karena segmentasi pemilih yang jelas, tim bekerja memastikan pilihan sebagian besar perempuan DIY mencoblos gambar Sang Ratu. Tim ini diisi oleh kampiun-kampiun pengorganisasian massa dan jaringan perempuan. Di Pemilu 2014 misalnya, dua anggota tim sukses Ibu Ratu adalah mantan anggota KPUD yang

ditarget memenuhi satu juta suara. Tim ini juga didukung oleh beberapa staff yang bekerja mendokumentasikan perkembangan sosial dan politik di Yogyakarta.



GKR saat menghadiri sidang bersama DPR dan DPD RI di Gedung MPR Senayan Jakarta/Dok. Pribadi

Di luar tim-tim tersebut, terdapat jaringan perempuan di tingkat RT, RW dan Dukuh yang secara sukarela berkampanye untuk kemenangan GKR Hemas. Tanpa perlu diorganisir, jaringan ibu-ibu PKK di tingkat akar rumput ini berkampanye mendukung kesuksesan Sang Ratu. Mesin ini efektif untuk mempengaruhi pemilih dibandingkan dengan gelontoran *money politics*.

Kombinasi permaisuri yang dipadu dengan tim yang efektif merupakan kunci kesuksesan elektoral Ratu Hemas. Kuatnya pilihan pemilih dalam kosmologi Jawa bahkan sempat memunculkan sejumlah isu. Misalnya di beberapa pelosok desa, orang takut mencoblos bagian tubuh foto GKR Hemas karena takut kuwalat. Entah benar atau tidak, hal

ini tentu merugikan Ibu Ratu. Persoalannya, apakah GKR Hemas akan meneruskan lagi periode 2019-2024 di DPD?

Warisan Pemilih yang Tidak Tergarap

Pada wawancara di pertengahan Januari 2015, Ratu Hemas sempat mengatakan bahwa 2014 adalah pemilu DPD terakhirnya. Beliau berencana akan menemani Sri Sultan secara penuh setelah terlibat di politik nasional 15 tahun. Persoalannya, sepertinya tidak ada satupun dari kelima putrinya yang tertarik untuk terlibat dalam politik praktis, setidaknya untuk saat ini. GKR Mangkubumi telah ditunjuk untuk ditempatkan di Yogyakarta. GKR Condrokirono, walaupun telah mewarisi dan diajak terlibat di beberapa organisasi perempuan, keluarga, dan anak namun sepertinya belum berminat terjun ke politik. GKR Maduretno tidak tertarik untuk tampil lebih banyak di muka publik. Dua putri terakhir, GKR Hayu dan GKR Bendoro, masih terlalu yunior dan lebih memilih merintis keluarga barunya.

Oleh karena itu, ada kemungkinan warisan konstituen tradisionalisme Jawa yang selama ini diciptakan, dirawat, dan dikembangkan GKR Hemas akan berubah. Meneruskan konstituen politik setidaknya dibutuhkan dua hal, pertama, secara geneologis, sang penerus harus memiliki hubungan dengan salah satu dari dua institusi tradisional di Yogyakarta yaitu Kasultanan dan Pakualaman. Kedua, dalam politik managerial, yang bersangkutan harus mampu menggunakan strategi dan teknik politik modern untuk memikat massa. Memadukan kedua hal tersebut, tentu tidak mudah.